

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori-teori yang secara komprehensif tentang pustaka dan acuan yang mendukung penelitian mengenai pengaruh indeks persepsi korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2012-2021.

2.1. Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu proses untuk memberikan kebebasan dengan memperluas pilihan-pilihan kepada masyarakat yang ada di suatu wilayah. Paradigma pilihan yang luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk lebih kreatif, inovatif dan produktif. Menurut Mudrajat (2016), IPM merupakan indikator untuk melihat bagaimana penduduk di suatu negara atau wilayah memiliki kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Komponen IPM ada tiga yaitu peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung dengan angka harapan hidup, pengetahuan diukur rata-rata lama sekolah dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita. Indikator IPM dikembangkan UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Premis penting dari pembangunan manusia menurut UNDP antara lain:

1. Pusat perhatian dari pembangunan manusia harus penduduk.
2. Pembangunan untuk memperluas pilihan secara keseluruhan bukan hanya ekonomi.
3. Pembangunan manusia bukan hanya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) tetapi memanfaatkan kemampuan dan keterampilan manusia secara optimal.

IPM memiliki manfaat penting dalam pembangunan dimana menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan sebagai upaya membangun kualitas masyarakat atau penduduk di wilayah tersebut (Mongan, 2019). Tingkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki setiap negara berbeda-beda dan tidak selalu bergantung pada tingkat pendapatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Todaro (2016), yaitu negara masih dapat berkinerja meskipun dengan pendapatan rendah namun belum tentu pendapatan tinggi kualitas pembangunan manusia tinggi.

2.1.2. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) telah digunakan untuk mengelompokkan negara baik itu negara maju, berkembang atau terbelakang dan kualitas sumber daya yang dimiliki. IPM adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia baik itu wilayah dan waktu dengan menggunakan tiga komponen dan masing masing presentase yakni kelangsungan hidup, pengetahuan dan daya beli (Raynaldhi, 2016).

Rumus perhitungan ketiga komponen IPM yaitu:

$IPM = 1/3$ (Indeks harapan hidup) + $1/3$ (indeks pendidikan + $1/3$ (indeks daya beli)

Skor IPM berkisar 0 sampai dengan 1 apabila skor IPM mendekati 1 maka nilai IPM semakin tinggi dan sumber daya manusia yang dimiliki negara atau wilayah tersebut berkualitas, dan sebaliknya jika mendekati 0 maka nilai IPM rendah serta tidak berkualitas sumber daya manusianya.

Kategori pengelompokan IPM menurut UNDP ada empat yaitu:

Tabel 2.1
Kategori Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia

No	Skor	Keterangan
1	$IPM \geq 0.800$	<i>Very high</i> HDI
2	$0.700 \leq \text{nilai IPM} < 0.800$	<i>High</i> HDI
3	$0.550 \leq \text{nilai IPM} < 0.700$	<i>Medium</i> HDI
4	nilai IPM < 0.550	<i>Low</i> HDI

Sumber: (*United Nation Development Program, 2022*)

Penjelasan mengenai penghitungan komponen IPM dan batas maksimum dan minimum dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPM

No	Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3	Rata-rata lama sekolah	15	0	Standar UNDP
4	Daya beli	PDB rill (\$)	PDB rill (\$)	Standar UNDP yang dilihat menggunakan PDB rill disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistika (2009)

2.2. Latar Belakang Lahirnya Kelembagaan

Tahun 1980-an mulai berkembang tentang institusi atau kelembagaan mulai berkembang dalam ilmu ekonomi, dikarenakan semakin banyak ekonom menyadari bahwa kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan kegagalan sebuah kelembagaan. Perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi tersebut melahirkan suatu cabang baru ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*).

2.1.1 Pengertian Kelembagaan

Menurut North (1991), pengertian kelembagaan adalah aturan (*constraints*) diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan – aturan tersebut terdiri dari aturan – aturan formal (misalnya: peraturan – peraturan, undang – undang, konstitusi) dan aturan – aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan. Aturan diciptakan untuk membuat tatanan (*order*) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam proses pertukaran. Williamson (2000) mengelompokkan kelembagaan empat tingkatan institusi berdasarkan analisis sosial, yakni:

1. Tingkatan pertama adalah tingkatan lekat sosial (*social embeddedness*) di mana kelembagaan telah melekat (*embeddedness*) dalam waktu yang sangat lama di dalam masyarakat dan telah menjadi pedoman masyarakat dalam hidup dan berkehidupan. Tingkatan ini sering juga disebut sebagai kelembagaan informal, misalnya: adat, tradisi, norma dan agama.

2. Tingkatan kedua disebut dengan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) yang sering juga disebut sebagai aturan main formal. Kelembagaan berkaitan dengan aturan hukum (khususnya hak kepemilikan), konstitusi, peraturan perundang – undangan, lembaga – lembaga yudikatif dan birokrasi. Institusi pada tingkatan ini diharapkan akan menciptakan aturan main formal yang baik (*first-order economizing*). Pengertian dan pelaksanaan hak kepemilikan dan hukum kontrak merupakan hal utama pada tingkatan kedua ini. Sistem perusahaan swasta (*private-enterprise*) tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya hak kepemilikan akan sumber daya. Adanya hak kepemilikan akan memaksa orang yang ingin menggunakan sumber daya tersebut untuk membayar kepada pemiliknya. Setelah hak kepemilikan ditetapkan dan dilaksanakan, pemerintah menjaga (melalui regulasi) agar sumber daya digunakan pada tingkat penggunaan yang terbaik.

3. Tingkatan ketiga yaitu tentang tata kelola (*governance*) yang baik agar biaya transaksi (*transaction costs*) dapat diminimumkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan, pengaturan dan penegakan sistem kontrak dengan baik. Sistem tata kelola ini bertujuan untuk menciptakan tatanan (*order*) yang baik agar dapat mengurangi konflik dan menghasilkan manfaat bersama (*mutual gains*). Tujuan kelembagaan pada tingkatan ini adalah menciptakan tata kelola yang baik (*second-order economizing*).

4. Tingkatan keempat adalah kelembagaan yang mengatur alokasi sumber daya dan pengerjaan (*employment*). Kelembagaan ini mengatur hubungan prinsipal dan agen atau lebih dikenal dengan teori keagenan (*agency theory*).

2.1.2 Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional Coleman (1990) merupakan upaya mendamaikan hubungan antara individu dan masyarakat, dan status rasionalitas historis dan normatif. Ide dasar pilihan rasional adalah tindakan individu dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu dengan suatu tujuan sehingga dengan adanya tujuan tersebut terbentuklah pilihan-pilihan dalam bertindak. Dua unsur yang membentuk teori pilihan rasional adalah aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan aktor. Adanya sumber daya yang dikendalikan oleh aktor inilah yang menyebabkan terjadinya sistem. Teori pilihan rasional menyatakan bahwa semua manusia adalah agen rasional yang terlibat dalam aktivitas yang dimotivasi semata-mata oleh kepentingan pribadi. Praktik korupsi dalam teori pilihan rasional individu seolah-olah dibenarkan oleh asumsi umum, di mana setiap individu akan mengejar kepentingan pribadinya jika diizinkan.

2.1.3 Teori Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik mendukung adanya kebebasan ekonomi yang diberikan negara dengan intervensi pemerintah yang tidak terlalu ketat, kebebasan pribadi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki serta hak milik yang terlindungi. Tahun 1776 dianggap sebagai tahun lahir teori ekonomi klasik dan Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul "*The Wealth of the Nations*" yang telah merevolusi cara pandang para pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan dibidang ekonomi dan perdagangan. Menurut pendapat Smith rakyat harus diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa campur tangan negara dan

barang, tenaga kerja, modal dan uang mengalir secara bebas. Pokok pikiran buku Adam Smith tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kebebasan (*freedom*): hak memproduksi, menukarkan, memperdagangkan, barang, tenaga kerja dan modal (*capital*)
2. Kepentingan diri sendiri (*self interest*), hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu orang lain
3. Persaingan (*competition*), hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa

2.3. Definisi Korupsi

Korupsi berasal dari kata *corruptio* yang dari bahasa latin kuno *corrumpore*. *Corruptio* artinya penyuapan dan memiliki makna merusak dalam ensiklopedia Indonesia sebagai gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyelewengkan kewenangan yang menyebabkan penyuapan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya. Menurut Philip (1997), secara luas terdapat tiga definisi korupsi yaitu:

1. Pusat korupsi ada di kantor publik (*public officer centered corruption*) di mana para pejabat publik menyimpang dari tugas - tugas demi keuntungan pribadi dan berhubungan dengan keluarga, teman dan kerabat.
2. Adanya korupsi yang terpusat memberikan dampak pada kepentingan umum (*public interest - centered*), pejabat publik akan mendapat imbalan baik itu uang atau materi lain sehingga merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

3. Pusat korupsi pada pasar (*market - centered*) di mana individu dan kelompok mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi serta hanya yang terlibat proses pembuatan keputusan dapat melakukan korupsi.

Dampak korupsi menurut Bhargava (2005), yaitu:

1. Korupsi mengganggu pembangunan ekonomi dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya korupsi maka berdampak pada pengurangan insentif untuk investasi produktif serta menurunkan kualitas infrastruktur, karena dana yang telah di anggarkan digunakan untuk kepentingan pejabat atau swasta.
2. Korupsi menyebabkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah menurun penyebabnya karena ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga melemahkan stabilitas politik dan legitimasi pemerintah.
3. Korupsi merusak tatanan sosial dengan membuat warga terasing oleh pemerintah karena adanya rasa ketidakpercayaan dan menghancurkan nilai-nilai bersama masyarakat.
4. Korupsi dapat membahayakan alokasi sumber daya untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan karena merupakan pengalihan sumber daya seperti pengadaan militer di mana transparansi sulit dicapai dan kesepakatan rahasia mudah dibuat.
5. Korupsi mendukung dan mempertahankan kegiatan ilegal seperti memperkuat permintaan barang dan jasa ilegal sehingga menjadi target jaringan kejahatan.

2.3.1. Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Price index*

Korupsi terjadi hampir di semua wilayah atau negara dan terutama di sektor publik. Pengukuran tingkat korupsi merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan, akan tetapi ada lembaga dunia yang menyusun indeks pengukuran korupsi sehingga korupsi dapat diukur yaitu *Transparency International* (TI). TI merupakan lembaga yang melakukan survei terhadap masyarakat, pelaku bisnis dan para ahli mengenai persepsi mereka tentang korupsi kemudian dibuat dalam bentuk indeks yang kemudian dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Price Index* (CPI). IPK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat korupsi setiap negara, karena menggabungkan berbagai sumber informasi korupsi.

TI Menyusun IPK menggunakan tiga belas sumber data dari 12 lembaga independen yaitu:

1. *African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment*
2. *Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicator*
3. *Bertelsmann Stiftung Sustainable Transformation Index*
4. *Economist Intelligence Unit Country Risk Service*
5. *Freedom House Nations in Transit*
6. *Global Insight Country Risk Ratings*
7. *IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey*
8. *Political and Economics Risk Consultancy Asian Intelligence*
9. *The PRS Group International Country Risk Guide*
10. *World Bank Country Policy and Institutional Assessment*

11. *World Economic Forum Executive Opinion Survey*

12. *World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey*

13. *Varieties of Democracy (V-Dem)*

Sumber yang digunakan untuk penyusunan IPK harus dapat menggambarkan semua cakupan tingkat korupsi baik itu di sektor publik atau politik. Perilaku korup dan pencegahan korupsi dinilai dengan ketigabelas sumber yaitu:

1. *Bribery* (Penyuapan)
2. *Diversion of public funds* (penyimpangan dana publik)
3. *Use of Public office for private gain* (Menggunakan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi)
4. *Nepotism in the civil service* (Nepotisme dalam pelayanan publik)
5. *State Capture* (Penguasaan oleh negara)
6. *The Government's ability to enforce integrity mechanisms* (Kemampuan Pemerintah untuk menegakkan mekanisme integritas)
7. *The effective prosecution of corrupt officials* (Penuntunan yang efektif terhadap korup)
8. *Red tape and excessive bureaucratic burden* (Birokrasi dan regulasi yang berlebihan)
9. *The existence of adequate laws on financial disclosure, conflict of interest prevention and access to information* (Keberadaan undang-undang yang memadai tentang pengungkapan keuangan, pencegahan konflik kepentingan dan akses ke informasi)

10. *Legal protection for whistleblowers, journalists and investigators*

(Perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyidik).

IPK direpresentasikan menggunakan nilai rentang 0 sampai dengan 100 semakin IPK mendekati nol (0) menunjukkan bahwa negara atau wilayah tersebut tingkat korupsi semakin tinggi, dan sebaliknya jika mendekati seratus (100) maka tingkat korupsi semakin rendah.

Interval tingkat korupsi secara lebih rinci dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Interval dan Keterangan Indeks Persepsi Korupsi

No	Interval	Keterangan
1.	0 –19	Sangat korup (<i>high corruption</i>)
2.	20 –39	Cenderung korup
3.	40 –59	Rentan korup
4.	60 –79	Cenderung bersih
5.	80 –100	Sangat bersih (<i>very clean</i>)

Sumber: (*Transparency International* , 2022)

2.4. Indeks Kebebasan Ekonomi

2.4.1. Definisi Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi menurut *Heritage Foundation* yaitu “*the fundamental right of every human to control his or her own labor and property*” artinya aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi dilakukan menurut pilihan pribadi tanpa adanya batasan dan hambatan. Menurut Saputra *et al.*, (2022), kebebasan ekonomi sebagai hak fundamental yang dimiliki individu manusia untuk mengendalikan tenaga dan harta bendanya sendiri. Stroup (2007) berpendapat bahwa peningkatan kebebasan ekonomi tidak hanya mengarah kepada kemakmuran tetapi juga memungkinkan hidup lebih lama dan sehat.

2.4.2. Indeks Kebebasan Ekonomi (IKE) atau *Economic Freedom Index* (EFI)

Kebebasan ekonomi merupakan hak yang dimiliki penduduk dan harus dipenuhi pemerintah di suatu wilayah atau negara tertentu. Pengukuran kebebasan ekonomi cukup sulit untuk dilakukan namun ada lembaga yang mengukur tingkat kebebasan ekonomi yaitu *Heritage Foundation*. Pengukuran yang dilakukan *Heritage Foundation* dengan menilai kebijakan suatu negara serta kebebasan individu dalam menggunakan tenaga kerja dan keuangan tanpa ada batasan serta campur tangan pemerintah yang kemudian direpresentasikan menjadi sebuah indeks dikenal sebagai Indeks Kebebasan ekonomi (IKE) atau *Economic Freedom Index* (EFI).

IKE adalah ukuran rata-rata sederhana dengan sepuluh kebebasan individu dan ukuran yang sifatnya vital terhadap pengembangan pribadi dan kesejahteraan nasional (Wulandari, 2016). IKE menggunakan skor dengan skala 0-100 jika mendekati 100 maka kebebasan ekonomi di negara atau wilayah tersebut semakin bebas, sebaliknya jika mendekati 0 maka tingkat kebebasan ekonomi semakin tidak bebas. Skor untuk perhitungan IKE diperoleh dengan merata-ratakan ke 10 nilai komponen penyusun yaitu :

1. *Property rights* atau kebebasan hak milik yaitu kebebasan terhadap kepemilikan dengan aturan yang digunakan untuk melindungi individu menggunakan skor 0-100.
2. *Freedom from corruption* atau kebebasan dari korupsi diukur menggunakan skor 0-100.

3. *Fiscal freedom* atau kebebasan fiskal mengukur beban pemerintah dari sisi pendapatan contohnya pajak penghasilan yang diperoleh dari individu atau kelompok yang diukur menggunakan skor 0-100.
4. *Government spending* atau kebebasan pengeluaran pemerintah melihat besaran diukur dari sisi konsumsi dan transfer, diukur menggunakan skor 0-100.
5. *Labor freedom* atau kebebasan tenaga kerja dimana mengatur upah minimum, hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), persyaratan pesangon yang diukur menggunakan skor 0-100.
6. *Monetary freedom* atau kebebasan moneter mencerminkan kondisi nilai tukar dan harga stabil serta intervensi pemerintah yang minim diukur menggunakan skor 0-100.
7. *Trade freedom* atau kebebasan perdagangan adalah keterbukaan ekonomi terhadap ekspor dan impor di pasar internasional yang dicerminkan dengan hambatan perdagangan yang semakin rendah. Pengukuran skor menggunakan 0-100.
8. *Investment freedom* atau kebebasan investasi yaitu kebebasan antar investor serta individu atau kelompok yang membutuhkan modal tanpa ada pembatasan dari negara diukur menggunakan skor 0-100.
9. *Financial freedom* atau kebebasan finansial yaitu minimnya intervensi pemerintah pada bidang keuangan dan perbankan, diukur menggunakan skor 0-100.

10. *Business Freedom* atau kemudahan bisnis yaitu kebebasan untuk menciptakan, mengoperasikan, dan menutup suatu perusahaan dengan cepat dan mudah tanpa dipersulit dengan regulasi. Pengukuran skor menggunakan 0-100.

Komponen penyusun IKE jika disusun menggunakan kategori besar terbagi menjadi empat pilar yaitu:

Tabel 2.4
Pilar dan Sub komponen IKE

No	Pilar	Sub - Komponen
1	<i>Rule of law</i>	1. <i>Property right freedom</i> 2. <i>Freedom from corruption</i>
2	<i>Limited government</i>	3. <i>Fiscal freedom</i> 4. <i>Government spending</i>
3	<i>Regulatory efficiency</i>	5. <i>Business freedom</i> 6. <i>Laborr freedom</i> 7. <i>Monetary freedom</i>
4	<i>Open markets</i>	8. <i>Trade freedom</i> 9. <i>Invesment freedom</i> 10. <i>Financial freedom</i>

Sumber: (*Heritage Foundation, 2022*)

2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.5.1. Definisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja dengan usia antara 15 – 64 tahun (Sulistiyono, 2019). Penduduk disebut tenaga kerja jika telah memasuki usia kerja, apabila belum memasuki usia kerja maka belum dapat disebut tenaga kerja. Tenaga kerja juga sebagai sumber daya manusia yang memiliki dua pengertian yaitu, pertama pengertian sumber daya manusia sebagai usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses produksi dengan menghasilkan barang dan jasa menggunakan kualitas yang dimiliki dan kedua sumber daya manusia yang bekerja

dengan memberikan jasa dan usahanya yang diukur dari kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan (Qaimah, 2022).

Tenaga kerja dibedakan menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kelompok yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan kelompok ini juga di bagi menjadi dua golongan menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu bersekolah dan mengurus rumah tangga, kelompok ini walaupun tidak sedang bekerja namun secara fisik dan mental dapat bekerja dan tidak menutup kemungkinan akan berpartisipasi dalam kelompok angkatan kerja (Hatta, 2017).

2.5.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk kerja suatu negara yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja baik dengan mencari kerja atau sedang mencari pekerjaan biasanya usia 15 tahun ke atas. Definisi TPAK menurut Badan Pusat Statistika (BPS) adalah presentase penduduk kerja usia 15 tahun ke atas dan masuk kedalam angkatan kerja, kemudian Sukirno (2011) juga mendefinisikan TPAK sebagai pengukuran besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja sebagai indikator dalam tingkat kesulitan bagi angkatan kerja dalam mencari pekerjaan. TPAK dapat menjadi gambaran proporsi penduduk usia tenaga kerja pada suatu kelompok, sehingga dapat digunakan sebagai indikator laju ketenagakerjaan (Suci, 2022). Tingkat TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa pasokan jumlah tenaga kerja (*Labor supply*) semakin besar. Rumus untuk penghitungan TPAK menurut Hatta (2017) adalah sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

2.5.3. Faktor-faktor Partisipasi Angkatan Kerja

Hidayat (2014) dalam penelitiannya membagi faktor - faktor partisipasi angkatan kerja yaitu:

1. Jumlah penduduk yang masih sekolah

Jumlah penduduk yang bersekolah semakin besar maka tingkat partisipasi angkatan kerja semakin kecil.

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga

Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga semakin banyak maka tingkat partisipasi angkatan kerja semakin kecil.

3. Tingkat Penghasilan keluarga

Keluarga dengan biaya hidup relatif cenderung akan mengurangi anggota keluarga mereka untuk bekerja, sehingga TPAK relatif rendah dan sebaliknya keluarga dengan penghasilan rendah akan mengarahkan anggota keluarganya untuk bekerja sehingga TPAK relatif besar,

4. Struktur Umur

Penduduk dengan usia muda biasanya tidak memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghidupi keluarganya. Untuk kelompok umur 22-55 tahun untuk laki-laki lebih dituntut untuk mencari kerja, sehingga TPAK menjadi besar sedangkan umur 55 tahun keatas tingkat produktivitasnya untuk bekerja sudah menurun sehingga TPAK menjadi lebih kecil.

5. Tingkat upah

Tingkat upah yang semakin tinggi akan mempengaruhi orang untuk bekerja sehingga TPAK menjadi semakin tinggi

6. Tingkat pendidikan

Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih menyediakan waktunya untuk bekerja, khususnya perempuan sehingga TPAK juga semakin besar.

7. Kegiatan perekonomian

Program pembangunan di satu pihak akan membutuhkan lebih banyak orang dan harapan untuk menikmati hasil pembangunan dengan ikut dalam partisipasi kerja. Kegiatan perekonomian yang semakin bertambah akan meningkatkan TPAK.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Hubungan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Soebagjo (2012), indeks persepsi korupsi mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik yang dilakukan pejabat negara atau politisi. Semakin tinggi skor indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa negara atau wilayah tersebut semakin bersih dari korupsi dan sebaliknya semakin rendah menunjukkan tingkat korupsi semakin tinggi. Hubungan indeks persepsi korupsi dengan indeks pembangunan manusia adalah ketika indeks persepsi korupsi meningkat artinya negara tersebut bebas dari korupsi sehingga sumber daya digunakan dengan baik seperti pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas

pendidikan dan pelatihan akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di mana indeks pembangunan manusia juga akan meningkat. Indeks persepsi korupsi rendah menggambarkan bahwa tingkat korupsi di negara tersebut tinggi akibatnya sumber daya yang digunakan untuk pembangunan manusia tidak dipergunakan dengan efisien dan efektif namun untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga indeks pembangunan manusia akan menurun dikarenakan kualitas pembangunan manusia yang terhambat karena korupsi.

2.6.2. Hubungan Indeks Kebebasan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Nurhasanah (2022), indeks kebebasan ekonomi dirancang untuk mengukur sejauh mana pemerintah dan kebijakan suatu negara konsisten dengan fungsi perlindungan dan kebebasan individu untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri. Skor indeks kebebasan ekonomi yang tinggi menggambarkan negara atau wilayah tersebut semakin bebas melakukan aktivitas ekonomi dan sebaliknya semakin rendah skor maka semakin banyak hambatan dan serta tantangan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Hubungan Indeks Kebebasan Ekonomi (IKE) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah semakin bebas dari hambatan yang ditunjukkan skor IKE tinggi menciptakan kerangka kerja di mana orang dapat memilih bagaimana menggunakan waktu, sumber daya dan keterampilannya lebih kreatif dan inovatif sehingga menciptakan lapangan kerja baru yang akan meningkatkan pendapatan, peningkatan ini memperbaiki kualitas pembangunan manusia karena masyarakat memiliki sumber daya untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas sehingga skor

indeks pembangunan manusia meningkat. Apabila skor IKE rendah masyarakat kesulitan melakukan kegiatan ekonomi banyaknya regulasi, pajak dan intervensi pemerintah pelaku ekonomi akan kesulitan memulai usaha akibatnya tenaga kerja yang terserap di pasar tenaga kerja berkurang dan dampaknya penurunan pendapatan akibatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki menurun karena pendapatan mereka hanya cukup untuk konsumsi bukan pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas.

2.6.3. Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Faelassuffa dan Yuliani (2022) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu indikator yang dapat menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hukom (2014) berpendapat bahwa dengan penyerapan tenaga kerja yang seimbang antara sektor pertanian dan non pertanian dapat merubah struktur ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Hubungan TPAK dengan IPM adalah ketika TPAK meningkat artinya kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar dengan adanya peningkatan ini menunjukkan individu dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan serta konsumsi untuk pendidikan dan layanan kesehatan juga akan lebih besar sehingga akan meningkatkan IPM karena pembangunan manusia yang berkualitas. TPAK yang rendah menggambarkan semakin sulit individu terserap pasar tenaga kerja akibatnya untuk memperoleh hidup yang berkualitas seperti menikmati pendidikan dan layanan kesehatan sulit diperoleh karena pendapatan mereka hanya

cukup untuk konsumsi rumah tangga sehingga kualitas pembangunan manusia menurun dampaknya indeks pembangunan manusia juga mengalami penurunan.

2.7. Studi Terkait

Penelitian Fitriani (2022) membahas tentang pengaruh korupsi terhadap indeks pembangunan manusia di negara Anggota Kerja Sama Islam (OKI) dengan kurun waktu 2012-2019 serta regresi data panel di 54 negara OKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara indeks persepsi korupsi terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar indeks persepsi korupsi maka semakin besar indeks pembangunan manusia di negara anggota OKI.

Penelitian Akcay (2006) membahas tentang korupsi dan pembangunan manusia di 63 negara hasil pengujian mengungkapkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara indeks persepsi korupsi dan pembangunan manusia. Bukti empiris dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara yang lebih korup cenderung memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih rendah. Singkatnya penelitian ini memperluas daftar konsekuensinya negatif dari korupsi dan berpendapat bahwa korupsi dalam segala aspeknya menghambat pembangunan manusia.

Penelitian Hanafi (2018) membahas pengaruh korupsi terhadap ibu kota provinsi di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruhnya korupsi di Indonesia yang tercermin dalam indeks persepsi korupsi (IPK) tentang indeks pembangunan manusia (IPM). Desain penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan judgment teknik,

dimana sampel penelitian adalah 54 dari 18 ibu kota provinsi dan tiga tahun pengamatan 2006, 2008 dan 2010. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan korupsi merugikan perkembangan manusia, artinya semakin tinggi korupsi maka semakin menurunkan pembangunan manusia di mana efek korupsi pada pembangunan manusia sebesar 11,06%.

Penelitian Ortega *et al.*, (2016) menganalisis korupsi terhadap proses pembangunan manusia di berbagai negara, periode 1990-2012 data yang digunakan yaitu indeks pembangunan manusia, rata-rata data mentah harapan hidup saat lahir, GNI per kapita, dan indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh transparansi international. Penelitian dilakukan dengan mengelompokkan 69 negara menjadi tiga kelompok sesuai dengan IHK selama periode ini hasilnya menunjukkan bahwa jika korupsi merusak pertumbuhan pembangunan manusia di seluruh negara, hal ini terutama karena dampak negatif terhadap pertumbuhan pendapatan dan pencapaian kesehatan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2022) yang membahas tentang pengaruh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kebebasan ekonomi terhadap pembangunan manusia di kawasan negara Asean dengan menggunakan analisis data tipologi Klassen dan regresi data panel dengan periode *time series* 2014-2019 dan jumlah *cross section* sebanyak 10 negara Asean yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja. Hasil penelitian menunjukkan kebebasan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia di ASEAN.

Penelitian Suparyati (2014) membahas pengaruh kebebasan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan periode *time series* 2009-2013 dan *cross section* sebanyak 158 negara dengan kelompok negara berdasarkan klasifikasi IPM yaitu, sangat tinggi (0,788 atau lebih), tinggi (0,667-0,785), sedang (0,488-0,669) dan rentang kurang dari 0,488. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok IPM yang sangat tinggi hanya pendapatan perkapita yang mempengaruhi IPM lalu untuk kelompok pembangunan manusia tinggi dan sedang hanya kebebasan ekonomi yang mempengaruhi IPM sedangkan IPM rendah pendapatan perkapita dan kebebasan ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian Georgiou (2012) membahas kebebasan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan periode *time series* 2000-2012 dan jumlah *cross section* sebanyak 18 negara yaitu, Australia, Belgia, Siprus, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Penelitian Nikolaev (2014) membahas kebebasan ekonomi dan kualitas hidup ini menggunakan regresi OLS dan OECD's *Your Better Life* indeks yang terdiri dari sebelas area menentukan kondisi kehidupan material (perumahan, pendapatan, dan pekerjaan) dan kualitas hidup (masyarakat, pendidikan, lingkungan, tata kelola, kesehatan, kepuasan hidup, keselamatan, dan keseimbangan kehidupan kerja) dengan periode *time series* 1970-2010 dan

mencakup tiga puluh empat negara anggota *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) yang mewakili negara sebagian negara maju dan berkembang di dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi mengarah pada peningkatan pembangunan manusia baik dalam jangka pendek (lima tahun) maupun jangka panjang (sepuluh tahun).

Penelitian Warits (2019) bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh indikator-indikator ekonomi di antaranya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan investasi asing terhadap pembangunan manusia di negara-negara Asean dari tahun 2013-2017. Penelitian menggunakan data sekunder dan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel TPAK berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia yang ada di ASEAN.

Penelitian Faelassuffa dan Yuliani (2022) memfokuskan indeks pembangunan manusia pada aspek kesejahteraan dengan melihat pada TPAK. Metode yang digunakan adalah menelaah dokumen berdasarkan studi kasus penelitian yang ada. Hasil yang didapatkan adalah TPAK dengan indeks pembangunan manusia saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut memiliki arah yang berbeda yaitu positif/negatif terhadap indeks pembangunan manusia, artinya kenaikan atau penurunan indeks pembangunan manusia dapat disebabkan oleh TPAK.

Penelitian Riyanti (2020) berusaha menarik keterkaitan antara beberapa indikator makro dengan capaian prsetasi IPM Jambi dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, gini rasio dan TPAK. Metode penelitian menggunakan

teknik regresi linear berganda dan data pertumbuhan ekonomi, IPM, gini rasio, dan TPAK yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, gini rasio, dan TPAK berpengaruh terhadap nilai IPM di provinsi Jambi, namun secara parsial hanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Penelitian Cahyanti *et al.*, (2021) bertujuan melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, TPAK, serta tingkat pengangguran terhadap IPM di provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder dari BPS Indonesia dalam runtut waktu 2010-2019. Penelitian menggunakan uji BLUE yang dibantu SPSS 13.0, hasil penelitian diperoleh jika secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM provinsi Jawa Timur dan secara parsial TPAK tidak berpengaruh terhadap IPM Jawa Timur.

Penelitian Bedagai *et al.*, (2023) bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Serdang Bedagai. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dalam kurun waktu 8 tahun (2010-2017). Hasil estimasi OLS menunjukkan bahwa variabel PDRB dan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten Serdang Bedagai sedangkan variabel TPAK tidak berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian Maulina dan Andriyani (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan TPAK

terhadap IPM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *time series* tahun 2005 sampai dengan 2019 dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM di Indonesia dan TPAK tidak berpengaruh terhadap IPM.

